



SALINAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja kearsipan, arsip sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, diperlukan klasifikasi arsip;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan klasifikasi arsip di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.

6. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### Pasal 2

Penyusunan Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator bertujuan untuk:

- a. memperoleh keseragaman dalam menggunakan Klasifikasi Arsip;
- b. mewujudkan tata kelola Kearsipan sesuai tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja;
- c. menunjang kelancaran penataan berkas dan penemuan kembali Arsip; dan/atau
- d. menunjang kodifikasi Arsip Dinamis di dalam sistem pemberkasan.

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:
  - a. fungsi fasilitatif; dan
  - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang pada unit sekretariat.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (4) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

- (1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. perencanaan;
  - d. hukum;
  - e. organisasi dan tata laksana;
  - f. persuratan dan kearsipan;
  - g. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - h. perlengkapan;
  - i. kehumasan;
  - j. penelitian, pengkajian, dan pengembangan;
  - k. perpustakaan;
  - l. teknologi informasi; dan
  - m. pengawasan.
- (2) Fungsi substansif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kedaulatan maritim dan energi;
  - b. sumber daya maritim;
  - c. infrastruktur dan transportasi;
  - d. pengelolaan lingkungan dan kehutanan;
  - e. pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - f. investasi dan pertambangan.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan sistem pengodean.
- (2) Sistem pengodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk huruf dan angka sebagai Kode Klasifikasi Arsip.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 835), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 590

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN  
2021 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KLASIFIKASI ARSIP  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A FUNGSI FASILITATIF

1 KP KEPEGAWAIAN

00 *Bezetting*/Persediaan Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan *bezetting*/persediaan pegawai.

00 Data Pegawai Hasil Pengklasifikasian

Naskah yang berkaitan dengan data pegawai hasil pengklasifikasian.

01 Kajian Data Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan kajian data pegawai.

02 Konsep Data *Bezetting*

Naskah yang berkaitan dengan konsep data *bezetting*.

03 Evaluasi Proses Penyusunan Data *Bezetting*

Naskah yang berkaitan dengan evaluasi proses penyusunan data *bezetting*.

04 Hasil dan Laporan Data *Bezetting*

Naskah yang berkaitan dengan hasil dan laporan data *bezetting*.

01 Formasi Pegawai

00 Usulan Formasi dari Unit Kerja

Naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan oleh unit kerja dan pengumpulan bahan untuk penyusunan usulan formasi termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan.



- 01 Usulan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)  
Naskah yang berkaitan dengan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  - 02 Persetujuan Formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)  
Naskah yang berkaitan dengan persetujuan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
  - 03 Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
  - 04 Penetapan Formasi Khusus  
Naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus, termasuk di dalamnya usulan formasi khusus.
- 02 Pengadaan Pegawai
- 00 Proses Penerimaan Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, mulai dari pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan, pelaksanaan ujian sampai dengan pengumuman kelulusan.
  - 01 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima  
Naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.
  - 02 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)  
Naskah yang berkaitan dengan nota usulan dan kelengkapan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
  - 03 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara

- (ASN) mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.
- 04 Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) Kolektif  
Naskah yang berkaitan proses Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) Kolektif.
- 05 Prajabatan  
Naskah yang berkaitan proses pelaksanaan prajabatan.
- 03 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi  
Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pejabat mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan pengumuman penerimaan.
- 04 Pembinaan Karir Pegawai
- 00 Penilaian Prestasi Kerja (DUPAK, PAK)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Prestasi Kerja termasuk di dalamnya pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional dan juga Penetapan Angka Kredit (PAK).
- 01 Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- 02 Pakta Integritas Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pakta integritas.
- 03 Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan LHKPN dan LHKASN.
- 04 Pembinaan Mental  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan mental pegawai termasuk di dalamnya ceramah keagamaan.
- 05 Disiplin Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai, termasuk di dalamnya daftar kehadiran/absensi pegawai dan rekapitulasi daftar kehadiran pegawai.

- 06 Hukuman Disiplin  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengan proses pemberian hukuman disiplin.
- 07 Penghargaan dan Tanda Jasa  
Naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan dan tanda jasa termasuk di dalamnya pemberian satya lencana karya satya.
- 05 Ujian Kenaikan Pangkat atau Jabatan
  - 00 Ujian Penyesuaian Ijazah  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai.
  - 01 Ujian Dinas  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan ujian dinas bagi pegawai.
- 06 Ujian Kompetensi
  - 00 *Assesment Test* Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan *Assesment Test* pegawai.
  - 01 Pemetaan/ *Talent Mapping* Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan Pemetaan/ *Talent Mapping* pegawai.
- 07 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai.
- 08 Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan proses penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai.
- 09 Mutasi Pegawai
  - 00 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Struktural dan Fungsional  
Naskah yang berkaitan dengan proses kenaikan pangkat/golongan/jabatan struktural dan fungsional pegawai.
  - 01 Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional.  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional termasuk di dalamnya pelantikan.

- 02 Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural/fungsional.
- 03 Alih Jabatan dan Perpindahan Jabatan  
Naskah yang berkaitan dengan alih jabatan dan perpindahan jabatan.
- 04 Kenaikan Gaji Berkala  
Naskah yang berkaitan dengan proses kenaikan gaji berkala.
- 05 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja  
Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Unit Kerja  
Naskah yang berkaitan dengan proses alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar unit kerja.
- 06 Rotasi Kerja  
Naskah yang berkaitan dengan proses rotasi kerja pegawai.
- 07 Penyesuaian/Peninjauan Masa Kerja  
Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.
- 08 Penyesuaian Tunjangan Keluarga  
Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
- 09 Penyesuaian Kelas Jabatan  
Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian kelas jabatan sehubungan dengan perubahan jabatan pegawai.
- 10 Mutasi Keluarga  
Naskah yang berkaitan dengan proses mutasi data keluarga termasuk pernikahan/perceraian, kelahiran anak, adopsi anak, meninggal dunia pegawai.
- 10 Berkas Tim Penilai Kinerja Pegawai (TPKP)/Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)  
Naskah yang berkaitan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat, termasuk di dalamnya pembentukan tim, usulan promosi jabatan, perencanaan, pengumpulan dan penyusunan bahan, penyelenggaraan dan hasil Baperjakat.

- 11 Pendelegasian Wewenang
  - 00 Pelaksana Tugas (Plt)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.
  - 01 Pelaksana Harian (Plh)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).
- 12 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
  - 00 Tugas Belajar

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan karir pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan tugas belajar dan laporan berkala pelaksanaan tugas belajar.
  - 01 Izin Belajar

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan karir pegawai berupa izin belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan tugas belajar dan laporan berkala pelaksanaan izin belajar.
  - 02 Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan

Naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan penjurangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi diklat penjurangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.
  - 03 Kursus/Diklat Fungsional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/diklat fungsional.
  - 04 Kursus/Diklat Teknis

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus/diklat teknis.

- 05 Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan orientasi CPNS/CASN seperti pembekalan CPNS/CASN, dan program magang CPNS/CASN di unit kerja.
- 13 Administrasi Pegawai
- 00 Data Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.
- 01 Kartu Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai
- 02 Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU).
- 03 Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
- 04 Kartu Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Keanggotaan Organisasi Profesi atau Kedinasan.
- 05 Kartu Jaminan Kesehatan  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang kartu jaminan kesehatan.
- 06 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4).
- 07 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP.
- 08 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan pegawai.
- 09 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)  
Naskah yang berkaitan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

- 14 Cuti Pegawai
  - 00 Cuti Besar

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti besar.
  - 01 Cuti Tahunan

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti tahunan.
  - 02 Cuti Sakit

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti sakit.
  - 03 Cuti Bersalin

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti bersalin.
  - 04 Cuti Alasan Penting

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti karena alasan penting.
  - 05 Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN).
- 15 Kesejahteraan Pegawai
  - 00 Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai meliputi penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti *medical check-up* PNS /ASN dan PNS/CASN, serta kegiatan peningkatan wawasan kesehatan.
  - 01 Layanan Asuransi Pegawai

Naskah yang berkaitan dengan pelayanan asuransi pegawai.
  - 02 Layanan Tabungan Perumahan (Taperum)

Naskah yang berkaitan dengan Tabungan Perumahan (Taperum).
  - 03 Layanan Bantuan Sosial

Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, dan sumbangan lainnya.
  - 04 Layanan Pakaian Dinas

Naskah yang berkaitan dengan pakaian dinas pegawai.

- 05 Layanan Pengurusan Jenazah  
Naskah yang berkaitan dengan layanan pengurusan jenazah pegawai.
- 16 Pemberhentian Pegawai
  - 00 Pemberhentian dengan Hormat  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pensiun termasuk di dalamnya pensiun/duda/janda/anak dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
  - 01 Pemberhentian dengan Tidak Hormat  
Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian.
- 17 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian  
Naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian.
- 18 Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai non Pegawai Negeri Sipil (pegawai kontrak, honorer, dan lain-lain)/PPPK.
- 19 Organisasi Non Kedinasan
  - 00 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - 01 Dharma Wanita  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - 02 Koperasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Koperasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



- 03 Yayasan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi yayasan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 04 Asosiasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi asosiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 20 Berkas Perseorangan Pegawai
  - 00 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai lamaran sampai dengan pensiun pegawai.
  - 01 Berkas Perseorangan Non Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  
Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Non Aparatur Sipil Negara (ASN)/PPPK mulai lamaran sampai dengan berhenti.

## 2 KU KEUANGAN

- 00 Pelaksanaan Anggaran
  - 00 Ketentuan/peraturan terkait pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran  
Naskah yang berkaitan dengan Ketentuan/peraturan terkait pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran.
  - 01 Dokumen Realisasi Pendapatan  
Naskah yang berkaitan dengan realisasi pendapatan meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukti setor, laporan realiasi.
  - 02 Belanja  
Naskah yang berkaitan dengan pembelanjaan/pengeluaran instansi.
  - 03 Dokumen Pembayaran Keuangan  
Naskah yang berkaitan dengan pembayaran keuangan meliputi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- 01 Pengelolaan Perbendaharaan
  - 00 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  
Naskah yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban.
  - 01 Kartu Pengawasan Kredit  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kartu pengawasan kredit.
  - 02 Berita Acara Pemeriksaan Kas  
Naskah yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan kas, meliputi kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
  - 03 Tuntutan Ganti Rugi  
Naskah yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, meliputi kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa tuntutan ganti rugi.
  - 04 Pembukuan Anggaran/Buku Kas Umum (BKU)/Buku Kas Pembantu (BKP)  
Naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan.
  - 05 Kartu Gaji  
Naskah yang berkaitan dengan kartu gaji pegawai.
- 02 Verifikasi Anggaran  
Naskah yang berkaitan dengan verifikasi anggaran yaitu kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.
- 03 Dokumentasi Akuntansi Keuangan
  - 00 Berita Acara Pemeriksaan Kas  
Naskah yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan kas, meliputi kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
  - 01 Kas/Register Penutupan Kas  
Naskah yang berkaitan dengan dokumen kas/register penutupan kas.

- 02 Berita Acara Rekonsiliasi Antar Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  
Naskah yang berkaitan dengan Berita Acara Rekonsiliasi.
- 04 Laporan Keuangan Tahunan
  - 00 Laporan Arus Kas  
Naskah yang berkaitan dengan laporan arus kas.
  - 01 Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal/Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Naskah yang berkaitan dengan laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
  - 02 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Naskah yang berkaitan dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  - 03 Laporan Realisasi Pendapatan Negara  
Naskah yang berkaitan dengan laporan realisasi pendapatan negara.
  - 04 Laporan Barang Milik Negara (BMN)  
Naskah yang berkaitan dengan laporan barang milik negara.
- 05 Ketatausahaan Keuangan
  - 00 Keterangan Penghasilan  
Naskah yang berkaitan dengan keterangan penghasilan.
  - 01 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan SKPP.
  - 02 Permohonan Pinjaman  
Naskah yang berkaitan dengan permohonan pinjaman.
  - 03 Iuran Keanggotaan Organisasi  
Naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi, baik tingkat nasional maupun internasional, mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai pelaporan.

- 06 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
- 00 Permohonan Pinjaman Luar Negeri/daftar proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (*Blue Book*)  
Naskah yang berkaitan dengan permohonan pinjaman luar negeri/daftar proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (*blue book*).
  - 01 Dokumen Kesanggupan Negara Donor Untuk Membiayai (*Grey Book*)  
Naskah yang berkaitan dengan dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (*grey book*).
  - 02 Dokumen *Momerandum of Understanding* (MoU) dan Dokumen Sejenisnya  
Naskah yang berkaitan dengan *Momerandum of Understanding* (MoU) dan dokumen sejenisnya.
  - 03 Dokumen *Loan Agreement* Pinjaman/Hibah Luar Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan loan agreement pinjaman/hibah luar negeri.
  - 04 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri.
  - 05 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)  
Naskah yang berkaitan dengan aplikasi penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN).
  - 06 Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)  
Naskah yang berkaitan dengan otorisasi penarikan dana (*Payment Advice*).
  - 07 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan realisasi pencairan dana bantuan luar negeri.
  - 08 *Replenishment* (Permintaan Penarikan Dana dari Negeri Donor)  
Naskah yang berkaitan dengan *Replenishment* (permintaan penarikan dana dari negeri donor).
  - 09 *Staff/ Appraisal Report*  
Naskah yang berkaitan dengan *staff/ appraisal report*.
  - 10 *Report/Laporan*  
Naskah yang berkaitan dengan report/laporan termasuk di dalamnya *Progress Report, Monthly report, Quartely report*.

- 11 Laporan Hutang Negara  
Naskah yang berkaitan dengan laporan hutang negara termasuk di dalamnya laporan pembayaran hutang negara dan laporan posisi hutang negara.
  - 12 *Completion Report/Annual Report*  
Naskah yang berkaitan dengan completion report/annual report.
  - 13 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan /Pinjaman Luar Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri.
- 07 Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)  
Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) meliputi keputusan Menteri/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 00 Keputusan Menteri/Keputusan pengguna anggaran  
Keputusan Menteri/Keputusan pengguna anggaran terkait penetapan, termasuk berita acara serah terima jabatan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Pengelola Barang.
- 08 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- 00 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi.
  - 01 Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan Surat Perintah Membayar (SPM)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan Surat Perintah Membayar (SPM).

- 02 Laporan Realisasi Bulanan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)/Triwulan/Semester  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan Laporan Realisasi Bulanan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)/Triwulan/Semester.
- 09 Pertanggungjawaban Keuangan Negara
  - 00 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  
Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berupa perhitungan anggaran dan pelaporan berupa Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
  - 01 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat.
  - 02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan aparat pemeriksa fungsional berupa LHP [Laporan Hasil Pemeriksaan), MHP, Tindak Lanjut/Tanggapan LHP.
  - 03 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian kerugian keuangan Negara berupa Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

### 3 PR PERENCANAAN

- 00 Perencanaan Program
  - 00 Kebijakan dan Strategi Pembangunan  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan mulai tahap perencanaan sampai dengan penetapan kebijakannya.
  - 01 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP.
  - 02 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM.

- 03 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang terdiri dari berkas penyusunan Renstra, dan dokumen Renstra.
- 04 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RKP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 05 Dokumen Rencana Kerja (Renja)  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Renja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdiri dari berkas kegiatan berkas dokumen Renja.
- 06 Dokumen Penetapan/Kontrak Kinerja  
Naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung terdiri dari Kontrak Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
- 07 Dokumen Rencana Terpadu Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lintas Kementerian /Lembaga  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan, dan penyerasian rencana terpadu program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kemaritiman dan investasi lintas Kementerian/Lembaga.
- 08 Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN)  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN).
- 01 Perencanaan Anggaran
  - 00 Kebijakan/Peraturan Penganggaran  
Naskah yang berkaitan dengan kebijakan/peraturan penganggaran berupa penyusunan anggaran, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Standar Biaya Keluaran, dokumen Arah

Kebijakan Pemerintah, dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Hasil Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah, Risalah Rencana Dana Pengeluaran dengan DPR, dan lain-lain.

01 Dokumen Penyusunan Pagu Indikatif

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Pagu Indikatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, terdiri dari dokumen usulan pemutakhiran dari unit kerja Kementerian.

02 Dokumen Penyusunan Pagu Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pagu anggaran, terdiri dari Surat Menteri Keuangan terkait penetapan pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Dokumen Berita Acara Penelaahan Pagu Anggaran.

03 Dokumen Penyusunan Alokasi Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan alokasi anggaran, terdiri dari Surat Menteri Keuangan terkait penetapan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL).

04 Dokumen Revisi Anggaran

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan revisi anggaran, baik revisi anggaran yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdiri dari usulan revisi dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, surat usulan revisi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dokumen pendukung usulan revisi, surat undangan penelaahan revisi, surat perintah/nota dinas penelaahan revisi, DIPA petikan setelah revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan perubahan revisi.



- 05 Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Pagu Indikatif (Inisiatif Baru]  
Naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran (inisiatif baru) sebelum ditetapkannya pagu indikatif. Dokumen ini terdiri dari dokumen usulan dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, surat usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, dokumen pendukung usulan berupa dan Rencana Anggaran Biaya.
- 06 Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Pagu Anggaran (Inisiatif Baru)  
Naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran (inisiatif baru) sebelum ditetapkannya Pagu Anggaran. Dokumen ini terdiri dari dokumen usulan dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, surat usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, dokumen pendukung usulan anggaran berupa TOR dan RAB.
- 07 Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Alokasi Anggaran (Inisiatif Baru)  
Naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran (inisiatif baru) sebelum ditetapkannya alokasi anggaran. Dokumen ini terdiri dari dokumen usulan dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, surat usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, dokumen pendukung usulan anggaran berupa TOR dan RAB.
- 08 Dokumen Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK)  
Naskah yang berkaitan dengan usulan SBK yang terdiri dari surat usulan SBK kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, surat undangan penelaahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Surat Perintah Penelaahan, Berita Acara Penelaahan Usulan SBK.
- 09 Dokumen Usulan Tambahan Anggaran (ABT) pada Tahun Berjalan  
Naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran (inisiatif baru) pada saat tahun berjalan. Dokumen ini terdiri dari dokumen usulan dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, surat usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, dokumen pendukung

usulan anggaran berupa TOR dan RAB, surat undangan penelaahan Usulan Tambahan Anggaran dari Kementerian Keuangan, surat perintah dan berita acara penelaahan, DIPA petikan perubahan anggaran.

02 Laporan

00 Laporan Berkala

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.

01 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP.

02 Laporan Insidental

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan *insidental* lembaga/instansi.

03 Penyiapan Bahan Nota Keuangan

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan nota keuangan yang terdiri dari surat permintaan masukan/koreksi draf nota keuangan dari Sekretaris Kabinet, usulan/masukan bahan nota keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dokumen nota keuangan.

04 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pengadaan.

05 Laporan ke Kantor Staf Presiden (KSP)

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan ke Kantor Staf Presiden (KSP).

06 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Anggaran dan Kinerja

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, anggaran dan kinerja.

- 07 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Survei Indeks Resiko Kemaritiman dan Investasi  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan survei indeks resiko kemaritiman dan Investasi.
- 08 Penyiapan Bahan Permintaan Data dari Instansi Lain (terkait dengan PPID)  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan permintaan data dari instansi lain terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- 03 Evaluasi Program
  - 00 Evaluasi Program Unit Kerja  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program unit kerja.
  - 01 Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 4 HK HUKUM
  - 00 Program Legislasi
    - 00 Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Instansi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan/materi program legislasi terkait Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun program legislasi nasional.
    - 01 Program Legislasi terkait Kemaritiman dan Investasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi terkait Kemaritiman dan Investasi.
  - 01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
    - 00 Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diprakarsai oleh

Kementerian/Lembaga di bawah di koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- 01 Rancangan Peraturan Pemerintah  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian/Lembaga di bawah dikoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- 02 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan/ atau Kementerian/Lembaga di bawah dikoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi .
- 03 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tahap rencana penyusunan/pengajuan sampai dengan pengundangan.
- 04 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tahap rencana penyusunan/pengajuan sampai dengan ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- 05 Instruksi/Surat Edaran  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan instruksi/surat edaran suatu permasalahan.
- 06 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Internasional/Nasional/Regional  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar/pedoman/prosedur kerja/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis yang bersifat internasional/nasional/regional mulai rancangan awal sampai dengan penetapan.

- 02 Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*/Kontrak/  
Perjanjian Kerja Sama
  - 00 Dalam Negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*/ kontrak/ perjanjian kerja sama dalam negeri dari proses perencanaan sampai penandatanganan kerja sama.
  - 01 Luar Negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*/kontrak/ perjanjian kerja sama luar negeri dari proses perencanaan sampai penandatanganan kerja sama.
- 03 Dokumentasi Hukum
  - 00 Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum dan penyebarluasan informasi hukum.
  - 01 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum dalam rangka penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.
  - 02 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemberian bantuan/konsultasi hukum/advokasi bidang litigasi dan non litigasi.
- 04 Kasus/Sengketa Hukum di Bidang Litigasi dan Non Litigasi
  - 00 Pidana

Naskah yang berkaitan dengan telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, pembelaan serta upaya dan bantuan hukum sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
  - 01 Perdata

Naskah yang berkaitan dengan telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus perdata.

- 02 Tata Usaha Negara  
Naskah, telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus Tata Usaha Negara (TUN).
- 03 Non Litigasi  
Naskah, telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan proses tentang kasus non litigasi.
- 05 Perizinan  
Naskah yang berkaitan dengan perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat izin.
- 06 Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - 00 Hak Cipta  
Naskah yang berkaitan dengan hak cipta sejak permohonan sampai dengan diterbitkan hak cipta.
  - 01 Hak Paten  
Naskah yang berkaitan dengan hak paten sejak permohonan sampai dengan diterbitkan hak paten.
  - 02 Hak Merek  
Naskah yang berkaitan dengan hak merek sejak permohonan sampai dengan diterbitkan hak merek
- 07 Telaah Hukum
  - 00 Telaah Hukum Internal  
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - 01 Telaah Hukum Eksternal  
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan pejabat berwenang instansi lain.
  - 02 Telaah Perjanjian  
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan kontrak, perjanjian, dan kerja sama.
  - 03 Telaah Akta  
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan akta, dan berita acara.

08 Penghargaan Kelembagaan

Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian penghargaan kelembagaan.

5 OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

00 Organisasi

00 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Naskah yang berkaitan dengan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, meliputi analisis dan evaluasi serta penyempurnaan struktur organisasi baik terhadap pembentukan, perubahan maupun pembubaran.

01 Analisis Organisasi

Naskah yang berkaitan dengan analisis organisasi.

02 Evaluasi Organisasi

Naskah yang berkaitan dengan evaluasi organisasi yaitu proses perubahan dan penyempurnaan organisasi.

01 Analisis Jabatan

00 Analisis Jabatan Struktural

Naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan struktural meliputi penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural.

01 Analisis Jabatan Fungsional

Naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan fungsional tertentu meliputi penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional tertentu.

02 Analisis Jabatan Pelaksana

Naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan pelaksana termasuk penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional umum.

02 Standar Kompetensi

00 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

Naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional.

- 01 Standar Kompetensi Jabatan Struktural  
Naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural.
- 03 Analisis Beban Kerja (ABK)  
Naskah yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja jabatan dan unit kerja serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja.
- 04 Tata Laksana
  - 00 Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penyelarasan proses bisnis.
  - 01 Evaluasi Proses Bisnis  
Naskah yang berkaitan dengan evaluasi proses bisnis.
  - 02 Penyusunan dan Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Naskah yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur, meliputi prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis tentang kegiatan rutin yang dapat dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (*flowchart*).
  - 03 Monitoring Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di unit kerja.
  - 04 Reformasi Birokrasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang meliputi; manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik.
- 05 Evaluasi Jabatan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



## 6 KA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

### 00 Administrasi Persuratan

#### 00 Kartu Kendali

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses persuratan dengan kartu kendali.

#### 01 Buku Agenda

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pengelolaan surat dengan menggunakan buku agenda.

#### 02 Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi/Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip

Naskah yang berkaitan dengan lembar pengantar/buku ekspedisi/formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen/arsip.

#### 03 Pengurusan Surat Masuk

Naskah yang berkaitan dengan pengurusan surat masuk meliputi kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.

#### 04 Pengurusan Surat Keluar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.

### 01 Pengelolaan Arsip Dinamis

#### 00 Penyusunan Sistem

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, petunjuk pelaksanaan atau pedoman lainnya, serta persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

#### 01 Pembinaan Kearsipan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi penilaian angka kredit arsiparis tingkat instansi, lomba tertib arsip, penilaian arsiparis berprestasi,

bimbingan teknis, apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan, supervisi, monitoring dan pengawasan kearsipan.

02 Pemeliharaan dan Penggunaan Arsip

00 Penataan, Penyimpanan, Pemeliharaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip terjaga, mulai dari penataan, penyimpanan, hingga pemeliharaan.

01 Layanan Penggunaan/Peminjaman Arsip

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan atau peminjaman arsip aktif di *central file* dan/atau arsip inaktif di *record center*.

03 Penyusutan Arsip

00 Pemindahan Arsip Inaktif

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan termasuk di dalamnya berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan.

01 Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna termasuk di dalamnya pembentukan panitia penilai arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan.

02 Penyerahan Arsip Statis

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis termasuk di dalamnya penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah, penilaian oleh panitia penilai, pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan, verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan, penetapan arsip yang akan diserahkan, dan pelaksanaan serah terima arsip statis termasuk di dalamnya berita acara serah terima arsip beserta daftar arsip yang diserahkan.

04 Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sistem kearsipan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan evaluasi sistem kearsipan.

7 RT KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

00 Layanan Penggunaan Fasilitas Kantor

00 Fasilitas Kendaraan Dinas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan perbaikan, serta laporan kehilangan kendaraan.

01 Fasilitas Gedung/Ruang Rapat/Konsumsi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan fasilitas gedung/ruang rapat/konsumsi berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.

02 Pemakaian Telepon, Internet, Listrik, Air

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telepon, internet, listrik, air

03 Administrasi Pemeliharaan Gedung dan Taman

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses administrasi pemeliharaan gedung dan taman.

04 Administrasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses administrasi pengelolaansarana dan prasarana kantor meliputi perbaikan, instalasi dan pengawasan instalasi.

05 Administrasi Pengadaan Alih Daya

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pengadaan alih daya.

01 Perjalanan dinas

00 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri termasuk pengurusan berkas dan tiket pesawat.

01 Perjalanan Dinas Luar Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan passport, visa dan tiket pesawat.

02 Ketertiban dan Keamanan

00 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengambilan, penjagaan, dan pengawasan terhadap pejabat, kantor, serta rumah dinas seperti daftar piket satuan pengamanan/*security*, buku/ formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan, kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan pengaturan perparkiran termasuk kartu parkir.

01 Pemantauan dan Pelaporan Ketertiban dan Keamanan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pelaporan ketertiban dan keamanan seperti kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan.

8 PL PERLENGKAPAN

00 Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

00 Analisis Kebutuhan Unit Kerja

Naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.

01 Tata Ruang

Naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.

02 Daftar Rekanan Mampu (DRM)

Naskah yang berkaitan dengan Daftar Rekanan Mampu (DRM) pengenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

01 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

00 Barang Habis Pakai/Alat Tulis Kantor (ATK)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang habis pakai/ATK dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).

- 01 **Perlengkapan Kantor**  
Naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan kantor seperti komputer, laptop, meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 02 **Tanah dan Bangunan**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan aset/kekayaan (sertifikat, izin mendirikan bangunan), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 03 **Kendaraan**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 04 **Telaahan Pelaksanaan Lelang/ Pemilihan/ Penunjukan Langsung**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan telaahan pelaksanaan lelang/pemilihan/penunjukan langsung.
- 05 **Dokumen Lelang**  
Naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan lelang/pemilihan/penunjukan langsung seperti barang inventaris kantor/ barang bergerak, penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang maupun barang investasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang).
- 06 **Pengelolaan Instalasi/Jaringan**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 07 **Peralatan Kearsipan**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan kearsipan seperti perangkat laboratorium, boks, rak, film dan lain-lain dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).

- 08 Jasa Profesi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa profesi dari proses awal sampai BAST.
  - 09 Sewa  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan sewa dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - 10 Jasa Akomodasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa akomodasi dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - 11 Jasa Lainnya  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa lainnya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 02 Penyimpanan Barang dan Distribusi
- 00 Penyimpanan Inventaris Kekayaan Negara  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan inventaris kekayaan negara untuk kepentingan internal maupun eksternal seperti surat bukti barang masuk, surat bukti pengeluaran barang.
  - 01 Pendistribusian  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian barang.
- 03 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- 00 Pembukuan BMN  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan BMN seperti daftar barang kuasa/pengguna, kartu identitas barang.
  - 01 Daftar Barang Ruangan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses identifikasi daftar barang yang ada pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - 02 Inventarisasi BMN  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, termasuk perencanaan sampai laporan hasil inventarisasi.

- 03 Penghapusan BMN  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acara.
- 04 Pelaporan BMN  
Naskah yang berkaitan dengan pelaporan BMN.
- 05 Sertifikasi BMN  
Naskah yang berkaitan dengan sertifikasi BMN yaitu kegiatan penetapan status penggunaan BMN.
- 04 Pemeliharaan/Perawatan BMN  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/perawatan BMN meliputi pelaporan, kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan *server/hosting*, perbaikan/server, kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.

## 9 HM KEHUMASAN

- 00 Administrasi Kegiatan Keprotokolan
  - 00 Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan acara kedinasan termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.
  - 01 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri.
  - 02 Agenda Pimpinan  
Naskah yang berkaitan dengan agenda pimpinan termasuk kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.
  - 03 Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Kerjasama  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* dan Kerjasama.

- 04 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan dan Acara Kedinasan Dalam Bentuk Video dan Foto  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan dan acara kedinasan dalam bentuk video atau foto.
- 05 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat  
Naskah yang berkaitan dengan daftar nama/alamat kantor/pejabat.
- 01 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan  
Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan meliputi kegiatan dokumentasi (pemotretan dan pengambilan gambar) dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.
- 02 Hubungan antar Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah
  - 00 Hubungan antar Lembaga Pemerintah  
Naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah.
  - 01 Hubungan dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  
Naskah yang berkaitan dengan organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  - 02 Hubungan dengan Badan Usaha  
Naskah yang berhubungan dengan Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta serta Koperasi).
  - 03 Hubungan dengan Perguruan Tinggi / Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL).  
Naskah yang berhubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL).
  - 04 Forum Kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat/ Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) Naskah yang berkaitan



dengan kegiatan forum kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat/Perhimpunan Hubungan Masyarakat).

05 Hubungan dengan Media Massa

Naskah yang berkaitan hubungan dengan Media Massa termasuk siaran pers, kunjungan wartawan/peliputan dan wawancara.

03 Dokumen Persidangan dan Rapat Paripurna, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Menteri, Rapat Dengar Pendapat DPR/DPD RI, Rapat Internal, dan Pidato Menteri Koordinator

Naskah yang berkaitan dengan dokumen persidangan dan rapat (Rapat Paripurna, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Menteri, Rapat Dengar Pendapat DPR/DPD RI, Rapat Internal, dan Pidato Menteri Koordinator).

04 Dokumentasi dan Penerbitan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan pengambilan gambar video) dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.

05 Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi melalui media cetak dan elektronik, termasuk di dalamnya pengelolaan *website*.

06 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan.

07 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan kepada Masyarakat Memiliki Jasa Prestasi Besar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi dalam bidang kemaritiman dan investasi.

08 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa dan Permohonan Maaf

Naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa dan permohonan maaf.

10 LT PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

00 Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

00 Administrasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi kegiatan pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan mulai dari rencana kerja, kerangka acuan kegiatan/proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat.

01 Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan kegiatan proses hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan mulai rancangan awal sampai dengan akhir termasuk catatan-catatan perkembangan dan rekaman kegiatan.

02 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan.

03 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan.

04 Forum Komunikasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum komunikasi penelitian, pengkajian dan pengembangan.

05 Seminar, Lokakarya, Temukarya, *Workshop*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan seminar, lokakarya, temukarya, pelatihan penelitian, pengkajian dan pengembangan.

01 Data dan Informasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

00 Data Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi penelitian, pengkajian dan pengembangan.

01 Informasi Statistik Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan informasi statistik penelitian, pengkajian dan pengembangan.

- 02 Jurnal Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan.
- 02 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan.

## 11 PP PERPUSTAKAAN

- 00 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka
  - 00 Bukti Penerimaan Koleksi Deposit Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan penerimaan koleksi deposit bahan pustaka berupa bukti penerimaan koleksi deposit bahan pustaka.
  - 01 Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan deposit bahan pustaka.
- 01 Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka
  - 00 Buku Induk Koleksi Naskah yang berkaitan dengan buku induk koleksi.
  - 01 Daftar Buku Terseleksi Naskah yang berkaitan dengan daftar buku terseleksi yang meliputi buku terseleksi, buku dalam pemesanan, buku dalam permintaan, penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah.
  - 02 Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus Naskah ini berkaitan dengan daftar pengiriman bahan pustaka surplus.
  - 03 Lembar Kerja Pengolahan BP (Buram, Pengkatalogan) Naskah yang berkaitan dengan lembar kerja pengolahan BP (Buram, Pengkatalogan).
  - 04 *Shelt List*/Jajaran Kartu Utama (*master list*) Naskah yang berkaitan dengan shelt list/Jajaran kartu utama (*master list*).
  - 05 Daftar Tambahan Buku (*Assesion List*) Naskah yang berkaitan dengan daftar tambahan buku (*Assesion List*).

- 06 Daftar/ Jajaran Kendali (Subjek dan Pengarang)  
Naskah yang berkaitan dengan daftar/jajaran kendali (subjek dan pengarang).
- 02 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
  - 00 Data pengguna/peminjaman bahan pustaka  
Naskah yang berkaitan dengan data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjam bahan pustaka.
  - 01 Formulir/daftar peminjaman bahan pustaka  
Naskah yang berkaitan dengan formulir dan daftar peminjaman pustaka

## 12 TI TEKNOLOGI INFORMASI

- 00 Rencana Strategis/*Master Plan* Pembangunan Sistem Informasi (SIM)
- 01 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dokumentasi arsitektur dan implementasi sistem di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beserta infrastrukturnya termasuk pengelolaan *website*.
  - 00 Sistem Informasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - 01 Sistem Aplikasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Sistem Aplikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - 02 Infastruktur  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan infrastruktur terkait penyusunan sistem di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 02 Perekaman dan Pemutakhiran Data  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perekaman dan pemutakhiran data mulai dari formulir isian, daftar petugas perekaman, jadwal pelaksanaan, sampai laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data.

- 00 Formulir Isian  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengisian formulir dalam proses perekaman dan pemuktahiran data.
- 01 Daftar Petugas Perekaman  
Naskah yang berkaitan dengan daftar petugas dalam proses perekaman dan pemuktahiran data.
- 02 Jadwal Pelaksanaan  
Naskah yang berkaitan dengan jadwal pelaksanaan perekaman dan pemuktahiran data.
- 03 Laporan Hasil Perekaman dan Pemuktahiran Data  
Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perekaman dan pemuktahiran data.
- 03 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan migrasi sistem aplikasi dan data mulai perencanaan migrasi, pelaksanaan migrasi, berita acara kegiatan migrasi, daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi, sampai laporan hasil migrasi.
  - 00 Perencanaan Migrasi  
Naskah yang berkaitan dengan perencanaan migrasi sistem aplikasi dan data.
  - 01 Pelaksanaan Migrasi  
Naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan migrasi sistem aplikasi dan data.
  - 02 Berita Acara Migrasi  
Naskah yang berkaitan dengan Berita Acara migrasi sistem aplikasi dan data.
  - 03 Daftar Sistem Aplikasi dan Data Yang Dimigrasi  
Naskah yang berkaitan dengan daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi.
  - 04 Laporan Hasil Migrasi  
Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pelaksanaan migrasi sistem aplikasi dan data yang dimigrasi.
- 04 Layanan *Back-up* Data Digital  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan *back-up* data digital.

- 05 Dokumen *Hosting*
  - Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dokumen *hosting*.
  - 00 Formulir Permintaan *Hosting*
    - Naskah yang berkaitan dengan formulir permintaan *hosting*.
  - 01 Laporan Hasil Uji Kelayakan
    - Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil uji kelayakan .
  - 02 Laporan Pelaksanaan *Hosting*
    - Naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan *hosting*.

### 13 PW PENGAWASAN

- 00 Rencana Pengawasan
  - 00 Rencana Strategis Pengawasan
    - Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana strategis pengawasan.
  - 01 Rencana Kerja Tahunan
    - Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan.
  - 02 Rencana Kinerja Tahunan
    - Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana kinerja tahunan.
  - 03 Penetapan Kinerja Tahunan
    - Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kinerja tahunan.
  - 04 Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional
    - Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.
- 01 Pelaksanaan Pengawasan
  - 00 Pengawasan Audit yang Memerlukan Tindak Lanjut
    - Naskah yang berkaitan dengan pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, meliputi Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Auditor Independen (LAI).

- 01 Pengawasan Audit Investigasi yang Memerlukan Tindak Lanjut  
Naskah yang berkaitan dengan audit investigasi yang memerlukan tindak lanjut, meliputi Laporan Hasil Audit Investigasi (LAHI) yang menandung unsur tindak pidana korupsi.
- 02 Pengawasan Audit yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut  
Naskah yang berkaitan dengan pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut, meliputi Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Auditor Independen (LAI).
- 03 Pengawasan Audit Investigasi yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut  
Naskah yang berkaitan dengan audit investigasi yang tidak memerlukan tindak lanjut, meliputi Laporan Hasil Audit Invesigasi (LHAI) yang tidak mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- 04 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat  
Naskah yang berkaitan dengan laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat, meliputi kegiatan pelaksanaan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat.
- 05 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan  
Naskah yang berkaitan dengan laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan.
- 06 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan perkembangan BMN.
- 07 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

08 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

B FUNGSI SUBSTANTIF

1 DE KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

00 Kebijakan Kedaulatan Maritim dan Energi

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kedaulatan maritim dan energi mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

01 Hukum dan Perjanjian Maritim

Naskah yang berkaitan dengan hukum dan perjanjian maritim, meliputi peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, serta hukum laut dan maritim internasional.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, serta hukum laut dan maritim internasional mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/*workshop*/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, serta hukum laut dan maritim internasional.



02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, serta hukum laut dan maritim internasional.

02 Keamanan dan Ketahanan Maritim

Naskah yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan maritim meliputi keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/*workshop*/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

03 Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan

Naskah yang berkaitan dengan delimitasi zona maritim dan Kawasan Perbatasan meliputi pemetaan, data kelautan, dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan, dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan, dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pemetaan, data kelautan, dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.

04 Navigasi dan Keselamatan Maritim

Naskah yang berkaitan dengan navigasi dan keselamatan maritim meliputi kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, dan penanganan kecelakaan maritim.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, dan penanganan kecelakaan maritim mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, dan penanganan kecelakaan maritim.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, dan penanganan kecelakaan maritim.

05 Energi

Naskah yang berkaitan dengan energi meliputi program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi serta partisipasi dan kerja sama energi.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi serta partisipasi dan kerja sama energi mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi serta partisipasi dan kerja sama energi.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi serta partisipasi dan kerja sama energi.

2 DM SUMBER DAYA MARITIM

00 Kebijakan Sumber Daya Maritim

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan sumber daya maritim mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang sumber daya maritim.

01 Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, meliputi penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

02 Pengelolaan Perikanan Tangkap

Naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, dan sarana prasarana penangkapan ikan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, dan sarana prasarana penangkapan ikan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, dan sarana prasarana penangkapan ikan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang

pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, dan sarana prasarana penangkapan ikan.

03 Pengembangan Perikanan Budidaya

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan perikanan budidaya meliputi pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pembenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana pembudidaya ikan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pembenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana pembudidaya ikan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pembenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana pembudidaya ikan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pembenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana pembudidaya ikan.

04 Peningkatan Daya Saing

Naskah yang berkaitan dengan peningkatan daya saing meliputi logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

05 Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Naskah yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya maritim meliputi hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

3 IT INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

00 Kebijakan Infrastruktur dan Transportasi

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan infrastruktur dan transportasi mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang infrastruktur dan transportasi.

01 Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air

Naskah yang berkaitan dengan Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, serta infrastruktur sumber daya air dan pantai.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, serta infrastruktur sumber daya air dan pantai mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.



01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, serta infrastruktur sumber daya air dan pantai.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, dan infrastruktur sumber daya air dan pantai.

02 Infrastruktur Pengembangan Wilayah

Naskah yang berkaitan dengan infrastruktur pengembangan wilayah meliputi infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, dan infrastruktur perekonomian.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengankoordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, dan infrastruktur perekonomian mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, dan infrastruktur perekonomian.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, dan infrastruktur perekonomian.

03 Infrastruktur Konektivitas

Naskah yang berkaitan dengan infrastruktur konektivitas meliputi infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu, dan infrastruktur pelayaran.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu, dan infrastruktur pelayaran mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu, dan infrastruktur pelayaran.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu, dan infrastruktur pelayaran.

04 Industri Pendukung Infrastruktur

Naskah yang berkaitan dengan industri pendukung infrastruktur meliputi industri digital, kawasan industri, dan industri bahan baku infrastruktur.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri digital, kawasan industri, dan industri bahan baku infrastruktur mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan

konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri digital, kawasan industri, dan industri bahan baku infrastruktur.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang industri digital, kawasan industri, dan industri bahan baku infrastruktur.

05 Industri Maritim dan Transportasi

Naskah yang berkaitan dengan industri maritim dan transportasi meliputi industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik.

4 LH PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

00 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pengelolaan lingkungan dan kehutanan mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

01 Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Naskah yang berkaitan dengan planologi kehutanan dan tata lingkungan, meliputi penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, dan optimalisasi tata lingkungan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, dan optimalisasi tata lingkungan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, dan optimalisasi tata lingkungan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, dan optimalisasi tata lingkungan.

02 Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan

Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan meliputi pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.

03 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam meliputi penataan kawasan daerah aliran sungai, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

04 Pengelolaan Sampah dan Limbah

Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah meliputi pengelolaan sampah, penanganan limbah, dan pengendalian kerusakan lingkungan.

- 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan  
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, dan pengendalian kerusakan lingkungan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.
- 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan  
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- 02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan  
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- 05 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan  
Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan meliputi pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, dan pengendalian kebencanaan.
- 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan  
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, dan pengendalian kebencanaan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, dan pengendalian kebencanaan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, dan pengendalian kebencanaan.

5 PE PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

00 Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

01 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, meliputi pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.



01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.

02 Pengembangan Ekonomi Kreatif

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif meliputi strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif.

03 Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Naskah yang berkaitan dengan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, dan analisis pasar permodalan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, dan analisis pasar permodalan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, dan analisis pasar permodalan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, dan analisis pasar permodalan.

04 Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Naskah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan pengembangan kekayaan intelektual.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan pengembangan kekayaan intelektual mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan pengembangan kekayaan intelektual.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan pengembangan kekayaan intelektual.

05 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Naskah yang berkaitan dengan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.

6 IP INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

00 Kebijakan Investasi dan Pertambangan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan investasi dan pertambangan mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang investasi dan pertambangan.

01 Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi

Naskah yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan percepatan investasi meliputi strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

02 Investasi Bidang Jasa

Naskah yang berkaitan dengan investasi bidang jasa meliputi perencanaan dan analisis, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang perencanaan dan analisis, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi.

03 Investasi Strategis

Naskah yang berkaitan dengan investasi Strategis meliputi perencanaan dan analisis, promosi dan fasilitasi investasi serta pemantauan dan evaluasi.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis, promosi dan fasilitasi investasi serta pemantauan dan evaluasi mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis, promosi dan fasilitasi investasi serta pemantauan dan evaluasi.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang

perencanaan dan analisis, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi.

04 Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha

Naskah yang berkaitan dengan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha meliputi perencanaan dan penyiapan kerja sama, implementasi kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama.

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama, implementasi kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama, implementasi kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama.

02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama, implementasi kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama.

05 Pertambangan

Naskah yang berkaitan dengan pertambangan meliputi pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, dan strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

- 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan  
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, dan strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara mulai dari persiapan, pemantauan lapangan, forum koordinasi dan konsultasi/workshop/seminar/sosialisasi hingga penetapan rekomendasi kebijakan.
- 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan  
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, dan strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.
- 02 Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan  
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan ,analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, dan strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,